

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Baik negara maju maupun negara berkembang masih mengalami kemiskinan. Kemiskinan adalah salah satu isu utama yang dihadapi perekonomian Indonesia, sebagai negara berkembang. Masalah kemiskinan berdampak signifikan terhadap urusan nasional dan negara. Upaya pemerintah suatu daerah atau negara untuk maju akan sangat terhambat oleh tingginya tingkat kemiskinan. Kemiskinan, menurut Adam (1776), adalah ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan mendasar seseorang dan menjunjung tinggi kualitas hidup yang layak. Orang-orang yang miskin tidak dapat memperoleh komoditas dan jasa yang dapat meningkatkan standar hidup mereka. Seseorang atau sekelompok orang yang tidak memiliki sarana untuk mempertahankan dan mengejar kehidupan yang memuaskan dan bermartabat dianggap dalam kemiskinan, sebagaimana didefinisikan dalam Undang-undang No. 24 Tahun 2004. Dalam konteks studi Sen (1981), selain kurangnya sumber daya atau konsumsi, kemiskinan digambarkan sebagai kondisi di mana seseorang tidak dapat mencapai kebutuhan mendasar mereka dan menjalani kehidupan yang terhormat.

Badan Pusat Statistik (BPS) yang menerbitkan statistik dan informasi kemiskinan setiap tahun dalam bentuk tabel berjudul Data dan Informasi Kemiskinan Kabupaten/kota, adalah sumber kriteria yang digunakan dalam penilaian kemiskinan di Indonesia. Masyarakat umum memiliki akses ke sebagian besar data. Di Indonesia, ada tingkat kemiskinan yang signifikan. Salah satu provinsi dengan tingkat kemiskinan tertinggi adalah Provinsi Nusa Tenggara Barat. Provinsi Nusa Tenggara Barat di Indonesia bagian timur adalah rumah bagi beragam ciri sosial, ekonomi, dan budaya. Kemiskinan adalah masalah kompleks yang dipengaruhi oleh sejumlah faktor sosial, ekonomi, dan lingkungan di Nusa Tenggara Barat. Meskipun memiliki sumber daya alam yang melimpah, provinsi ini memiliki prevalensi kemiskinan yang tinggi, yang merupakan cerminan dari tantangan yang dihadapi kesejahteraan dan pembangunan masyarakat.

Perikanan dan pertanian menyumbang porsi besar dari perekonomian Nusa Tenggara Barat. Karena banyak komunitas masih menggunakan metode kuno dan tidak efektif, uang yang dihasilkan sering kali tidak cukup untuk menutupi pengeluaran penting. Kemiskinan diperparah oleh volatilitas harga komoditas pertanian, yang juga menambah ketidakpastian ekonomi. Empat variabel komposit dari variabel IPM (harapan hidup, rata-rata lama sekolah, pengeluaran per kapita, dan harapan durasi sekolah) akan dijelaskan oleh peneliti dalam penelitian ini.

Indikator utama untuk mengevaluasi kesejahteraan dan kesehatan umum suatu populasi adalah harapan hidup. Harapan hidup yang sangat pendek di Nusa Tenggara Barat adalah cerminan dari banyak kesulitan yang dihadapi penduduk setempat, banyak di antaranya saling terkait dengan masalah kemiskinan. Kondisi kesehatan yang buruk, seperti akses terbatas ke perawatan kesehatan, nutrisi yang tidak memadai, dan frekuensi penyakit menular, diketahui memiliki dampak yang signifikan pada harapan hidup yang rendah. Orang miskin sering kali tidak memiliki akses ke makanan sehat dan perawatan kesehatan yang memadai, yang meningkatkan tingkat kematian, terutama untuk anak-anak dan ibu hamil.

Di Nusa Tenggara Barat, banyak daerah yang masih sulit dijangkau oleh fasilitas kesehatan, dan kualitas layanan yang tersedia sering kali tidak memadai. Keterbatasan ini mengakibatkan masyarakat, khususnya yang berpendapatan rendah, mengalami kesulitan dalam memperoleh perawatan kesehatan yang diperlukan. Kesehatan yang buruk akan berdampak langsung pada produktivitas individu dan kemampuan mereka untuk mencari nafkah. Kemiskinan sering kali terkait dengan kondisi sosial yang lebih luas, seperti kurangnya infrastruktur, kualitas lingkungan yang buruk, dan ketidakadilan sosial. Orang-orang yang hidup dalam kemiskinan sering kali memiliki akses terbatas ke sumber daya yang dibutuhkan untuk meningkatkan kesehatan mereka, sehingga semakin sulit untuk keluar dari siklus kemiskinan.

Harapan lama sekolah adalah faktor kedua yang mempengaruhi kemiskinan di Nusa Tenggara Barat. Harapan lama sekolah adalah indikator

penting yang menggambarkan jumlah tahun pendidikan yang diharapkan dijalani oleh anak-anak di suatu daerah. Rendahnya harapan lama sekolah di Nusa Tenggara Barat adalah salah satu hal yang memicu masalah kemiskinan yang sedang berlangsung di provinsi ini. Akses terhadap pendidikan formal di Nusa Tenggara Barat masih terbatas, terutama di daerah pedesaan dan terpencil. Infrastruktur yang kurang memadai, seperti sekolah yang jauh dan fasilitas yang minim, menjadi penghalang bagi anak-anak untuk melanjutkan pendidikan. Tanpa pendidikan yang memadai, individu akan kesulitan untuk memperoleh keterampilan yang diperlukan untuk mendapatkan pekerjaan yang layak.

Selain akses, kualitas pendidikan di Nusa Tenggara Barat juga sering kali menjadi perhatian. Banyak sekolah yang menghadapi kekurangan guru berkualitas, bahan ajar yang tidak memadai, dan metode pengajaran yang kurang efektif. Hal ini mengakibatkan hasil belajar yang rendah, sehingga anak-anak tidak dapat mencapai potensi penuh mereka dan sulit untuk bersaing di pasar kerja. Harapan lama sekolah yang rendah memiliki efek langsung pada kapasitas seseorang untuk mendapatkan pekerjaan yang baik dan stabil. Dengan harapan lama sekolah yang rendah, masyarakat Nusa Tenggara Barat terjebak dalam lingkaran kemiskinan, sehingga mereka tidak dapat mencapai potensi penuh mereka dan sulit untuk bersaing di pasar kerja.

Di Nusa Tenggara Barat, rata-rata lama sekolah juga berpengaruh pada kemiskinan. Rata-rata waktu sekolah yang singkat di daerah ini adalah salah satu penyebab utama tingginya tingkat kemiskinan di Nusa Tenggara Barat karena pendidikan, keterampilan, dan peluang ekonomi sangat terkait. Banyak anak muda yang tidak menyelesaikan pendidikan resmi mereka ke tingkat menengah, terutama di daerah pedesaan. Rendahnya rata-rata lama sekolah disebabkan oleh fasilitas pembelajaran yang tidak memadai, infrastruktur yang tidak memadai, dan pengajaran di bawah standar. Akibatnya, banyak orang tidak memiliki keterampilan yang diperlukan untuk bersaing di pasar kerja.

Pencapaian pendidikan yang rendah juga berkontribusi pada kurangnya pemahaman tentang nilai pendidikan bagi anak-anak. Karena banyak orang tua dengan pencapaian pendidikan rendah menghalangi anak-anak mereka untuk

pergi ke sekolah, kemiskinan melanggengkan dirinya sendiri dan generasi mendatang dibiarkan menanggung perjuangan yang sama tanpa adanya akses ke pendidikan berkualitas tinggi. Di Nusa Tenggara Barat, individu dengan tingkat pendidikan rendah terjebak dalam pekerjaan informal dengan pendapatan yang tidak memadai, memperburuk kemiskinan. Tingkat pendidikan yang buruk juga berdampak langsung pada kemampuan individu untuk mendapatkan pekerjaan yang baik. Pendidikan tinggi biasanya membuka akses ke pekerjaan dengan gaji yang lebih baik.

Jumlah yang dibelanjakan per orang juga berdampak pada kemiskinan di Nusa Tenggara Barat. Salah satu penyebab utama masalah kemiskinan yang terus-menerus serius di Nusa Tenggara Barat adalah rendahnya pendapatan per kapita di provinsi ini. Mayoritas penduduk di Nusa Tenggara Barat mencari nafkah dari industri pertanian dan perikanan, yang sering memberikan upah yang tidak menentu. Pengeluaran per kapita yang rendah menunjukkan bahwa sejumlah besar individu mengalami kesulitan memenuhi persyaratan paling dasar mereka, seperti makanan, perawatan medis, dan pendidikan. Sangat menantang untuk meningkatkan standar hidup dan memerangi kemiskinan dengan pendapatan yang sedikit ini. Di Nusa Tenggara Barat, ekonomi tumbuh, namun sebagian besar masyarakat masih hidup dalam kondisi di bawah standar karena distribusi pendapatan yang tidak merata. Sementara masyarakat pedesaan terus dikecualikan, daerah perkotaan tertentu mungkin mengalami pertumbuhan ekonomi, karena mereka yang tinggal di daerah terpencil tidak dapat mengakses prospek ekonomi yang lebih besar, ketimpangan ini memperburuk kondisi kemiskinan.

Pengeluaran per kapita yang rendah juga mempengaruhi akses masyarakat ke layanan dasar seperti pendidikan dan kesehatan. Banyak keluarga yang berjuang untuk membayar pendidikan anak-anak mereka atau untuk mengakses perawatan kesehatan yang berkualitas karena kendala keuangan. Hal ini mengarah pada siklus kemiskinan yang tidak dapat dipecahkan di mana mereka tidak mampu membayar pengeluaran kesehatan dan pendidikan memiliki efek yang merugikan pada pendapatan dan produktivitas di masa depan. Di Nusa Tenggara Barat, faktor sosial dan budaya juga mempengaruhi

pengeluaran per kapita. Keterbatasan pengetahuan mengenai manajemen keuangan dan investasi dalam pendidikan sering kali menghalangi keluarga untuk meningkatkan kesejahteraan mereka. Selain itu, norma sosial yang mengedepankan tradisi dapat mengakibatkan pengabaian terhadap pendidikan dan peluang kerja yang lebih baik.

Kemiskinan di Provinsi Nusa Tenggara Barat merupakan cerminan dari kompleksitas dan beragam masalah yang dihadapi masyarakat Indonesia. Karena ketergantungan pada pertanian dan infrastruktur yang tidak memadai, Provinsi Nusa Tenggara Barat menghadapi kesulitan struktural yang signifikan. Setiap pemerintah daerah harus memprioritaskan pengentasan kemiskinan. Hal ini perlu dilakukan untuk mengurangi dampak kemiskinan, yang telah mempengaruhi aspek sosial dan ekonomi kehidupan masyarakat. Mengurangi kemiskinan adalah upaya yang menantang karena berbagai faktor harus dipertimbangkan saat menilai keberhasilan program sebelumnya. Identifikasi yang akurat dari elemen-elemen penentu ini sangat penting agar rencana yang dihasilkan memiliki peluang untuk berhasil.

Untuk mengatasi kemiskinan di wilayah ini, diperlukan pendekatan yang holistik dan terintegrasi yang mempertimbangkan karakteristik lokal dan berfokus pada peningkatan akses terhadap pendidikan, kesehatan, dan peluang ekonomi, serta perbaikan infrastruktur dan kebijakan yang mendukung kesejahteraan sosial. Berdasarkan pernyataan dan uraian latar belakang yang sudah dijelaskan maka peneliti tertarik mengambil judul "*Analisis Pengaruh Indikator Komposit IPM Terhadap Kemiskinan di Provinsi Nusa Tenggara Barat Studi Kasus 10 Kabupaten/kota*".

1.2 Rumusan Masalah

Penulis dapat merumuskan masalah sebagai berikut berdasarkan latar belakang masalah yang diberikan sebelumnya.

1. Bagaimana pengaruh angka harapan hidup terhadap kemiskinan di Kabupaten/kota Provinsi Nusa Tenggara Barat?
2. Bagaimana pengaruh harapan lama sekolah terhadap kemiskinan di Kabupaten/kota Provinsi Nusa Tenggara Barat?

3. Bagaimana pengaruh rata-rata lama sekolah terhadap kemiskinan di Kabupaten/kota Provinsi Nusa Tenggara Barat?
4. Bagaimana pengaruh pengeluaran per kapita terhadap kemiskinan di Kabupaten/kota Provinsi Nusa Tenggara Barat?

1.3 Tujuan Penelitian

Setiap penelitian yang dilakukan tentunya harus mempunyai tujuan yang jelas dan menjadi pedoman dalam penulisan proposal. Karena itu, berikut ini adalah tujuan yang ingin dicapai oleh penelitian ini, sebagaimana dinyatakan dalam rumusan masalah tersebut di atas:

1. Menganalisis pengaruh angka harapan hidup terhadap kemiskinan di Kabupaten/kota Provinsi Nusa Tenggara Barat.
2. Menganalisis pengaruh harapan lama sekolah terhadap kemiskinan di Kabupaten/kota Provinsi Nusa Tenggara Barat.
3. Menganalisis pengaruh rata-rata lama sekolah harapan hidup terhadap kemiskinan di Kabupaten/kota Provinsi Nusa Tenggara Barat.
4. Menganalisis pengaruh pengeluaran per kapita terhadap kemiskinan di Kabupaten/kota Provinsi Nusa Tenggara Barat.

